

SKRIPSI

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK

NO. 31 DAN SAK ETAP PADA BPR DI KOTA PADANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

MELDA AMDAYANI

06 153 008



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan BPR di kota Padang berdasarkan PSAK No. 31 mengenai Akuntansi Perbankan dan bagaimana jika laporan keuangan BPR di kota Padang tersebut disajikan berdasarkan SAK ETAP dimana SAK ETAP mulai berlaku efektif pada tahun 2011, tetapi penerapan dini diperbolehkan.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yaitu data primer yang diperoleh dari BPR di kota Padang berupa laporan keuangan periode 2008-2009 dan profil BPR yang bersangkutan. Data diolah menggunakan analisa deskriptif, dimana dalam analisa dan pembahasan dijelaskan mengenai perbandingan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 31 dan SAK ETAP.

Penelitian ini membuktikan bahwa BPR yang menjadi sampel penelitian belum menerapkan PSAK No. 31 mengenai Akuntansi Perbankan, BPR juga menyajikan laporan keuangan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 mengenai Pedoman Penyusunan laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif bank Perkreditan Rakyat, BPR juga belum melakukan pemisahan pencatatan antara tanah dan bangunan padahal kedua akun tersebut memiliki nilai nominal masing-masing.

Kata kunci : *PSAK No. 31 mengenai Akuntansi Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia dan SAK ETAP.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi telah mendorong penerapan standarisasi perlakuan dan penyajian informasi akuntansi yang berpedoman pada *International Accounting Standard* (IAS). Standarisasi penyajian informasi akuntansi diperlukan karena banyak pihak (*stakeholder*) berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan perbankan, salah satu perusahaan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, sangat membutuhkan standarisasi dalam penyajian laporan keuangan, karena masyarakat sangat membutuhkan informasi kondisi bank dimana tempat mereka menyimpan uangnya. Oleh karena itu, masyarakat sangat membutuhkan informasi perusahaan perbankan agar dapat membandingkan, menganalisis, menyimpulkan dan selanjutnya mengambil keputusan berkaitan dengan kondisi perusahaan perbankan dimana dana mereka disimpan.

Di pihak lain perusahaan perbankan menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena bank sangat membutuhkan simpanan dari masyarakat dan sebagian besar modal kerja bank merupakan kekayaan masyarakat yang ditiptkan kepada bank. Jika diperhatikan neraca bank pada sisi kewajiban dan ekuitas, maka sebagian besar kewajiban bank adalah merupakan simpanan masyarakat, sedangkan besarnya modal bank lebih

kecil dibanding dengan kewajiban bank. Oleh karena itu, perbankan merupakan satu-satunya perusahaan yang mempunyai *debt equity ratio* (DER) terbesar. Sehingga kelangsungan hidup usaha bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang tidak lagi percaya kepada bank kemudian beramai-ramai menarik dana dari bank secara besar-besaran, yang akan menamatkan kelangsungan hidup bank. Melihat begitu rentannya kelangsungan hidup usaha bank, maka berbagai regulasi dilakukan termasuk di dalamnya ketentuan tentang kebijakan di bidang pencacatan akuntansi.

Menurut **Bastian** (2006:236) regulasi perbankan di bidang akuntansi dilakukan antara lain dengan penerapan standarisasi laporan keuangan untuk industri perbankan. Bank Indonesia sebagai pengawas bank-bank di Indonesia menetapkan aturan mengenai perlakuan akuntansi perbankan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang disajikan oleh bank-bank. Dalam kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia harus menetapkan kebijakan akuntansinya yang disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur laporan keuangan khususnya yang ditujukan kepada pihak luar seperti pemegang saham, kreditur, fiskus dan sebagainya. Pada tahun 1992 Bank Indonesia bekerjasama dengan IAI menerbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berisikan petunjuk pelaksanaan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan bank, yang selanjutnya pada bulan Juni 2001 telah direvisi menjadi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khususnya PSAK Nomor 31 tentang Akuntansi

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas diperoleh kesimpulan bahwa :

- a) BPR di kota Padang belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 31 (revisi 2000) mengenai akuntansi perbankan. Selain itu, penyusunan laporan keuangan juga mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.8/ 7 /DPBPR Tanggal 23 Februari 2006 Mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- b) BPR belum melakukan pemisahan pencatatan antara tanah dan bangunan, sehingga harus dilakukan pemisahan pencatatan tanah dan bangunan, karena kedua akun tersebut memiliki nilai masing-masing, meskipun bangunan berdiri di atas tanah. Jika pencatatan tidak dipisahkan, maka tidak menunjukkan nilai sesungguhnya dari tanah dan bangunan yang bersangkutan.
- c) Ada beberapa hal yang perlu ditambah oleh BPR dalam menyajikan laporan keuangan seperti : laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal itu sangat penting, agar tidak

DAFTAR PUSTAKA

- A. Alvin Arens, dkk. 2006. *Auditing*. Jakarta. Salemba Empat.
- Bank Indonesia. 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008)*. Jakarta. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
- Bastian, Indra. 2004. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Harahap, SyofyanSyafri. 2004. *TeoriAkuntansi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hariani, D. Jenny. 2005. *Analisis Dampak Penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan terhadap Laba Bersih Perusahaan (Survei pada Perusahaan yang terdaftar di BEI (Skripsi)*. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Gubernur Bank Indonesia. 2006. *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta.
- Gunawan. 2007. *Genius Learning Strategy*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [http : Pricewaterhouse Coopers-Assurance](http://www.pricewaterhousecoopers.com) _2009-3
- Gade, Muhammad. 2005. *Teori Akuntansi Cetakan : I*. Jakarta. Almahira.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2000. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 mengenai Akuntansi Perbankan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi Cetakan Ketujuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Irsyad. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Medan. USU Press.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*, Edisi 6. Jakarta. Salemba Empat.
- Munawir. 2004. *Manajemen Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Patriatiningrum, Rakhmawati. 2007. *Analisis Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Usaha pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004-2005 (Skripsi)*. Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.